

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA
KANTOR CABANG BAGINDO AZIZ CHAN PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Diploma III Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

DEWI WAHYUNI EKA PUTRI

57988-2010

**PROGAM STUDI AKUNTANSI D III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**Sistem Pengendalian Intern Pembayaran Klaim Asuransi
Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera
Kantor Cabang Bagindo Aziz Chan Padang**

**Nama : Dewi Wahyuni Eka Putri
BP/NIM : 2010/57988
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Agustus 2014

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III

Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Disetujui Oleh
Pembimbing

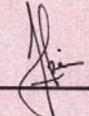

Mayar Afriventi, SE, M. Sc
NIP.19840113 200912 2 005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**Sistem Pengendalian Intern Pembayaran Klaim Asuransi
Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera
Kantor Cabang Bagindo Aziz Chan Padang**

Nama : Dewi Wahyuni Eka Putri
BP/ NIM : 2010/ 57988
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2014

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Mayar Afriyenti, SE, M. Sc	(Pembimbing)	 _____
2. Nurzi Sebrina, SE, Ak, M. Sc	(Penguji I)	 _____
3. Friyatmi, S.Pd, M. Pd	(Penguji II)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Wahyuni Eka Putri
 Thn Masuk/NIM : 2010/57988
 Tempat/Tgl Lahir : Talang Babungo, 09 Juni 1992
 Program Studi : Akuntansi (D III)
 Keahlian : Akuntansi Keuangan
 Fakultas : Ekonomi
 Alamat : Talang Timur Jln. Proklamasi No. 11 Nagari Talang Babungo
 Kec. Hiliran Gumanti
 Kabupaten Solok
 No. Hp : 082392446612
 Judul Tugas Akhir : SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN KLAIM
 ASURANSI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB)
 BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG BAGINDO AZIZ CHAN
 PADANG

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan untuk kutipan dengan mengikuti cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, penguji dan ketua prodi studi.

Demikianlah pernyataan ini saya tandatangi dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2014
 yang Menyatakan,

DEWI WAHYUNI EKA PUTRI
 57988



ABSTRAK

DEWI WAHYUNI EKA PUTRI: Sistem Pengendalian Intern Pembayaran Klaim Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Kantor Wilayah Padang

Observasi ini menggambarkan bagaimana sistem pengendalian intern pembayaran klaim asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Kantor Wilayah Padang. Apakah sistem pengendalian intern tersebut dijalankan dengan baik atau tidak.

Hasil observasi mengenai sistem pengendalian intern yang diterapkan pada kantor cabang wilayah Padang telah dijalankan dengan baik ini terlihat dalam kegiatan operasional telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan terdapat pemisahan fungsi yang baik.

Walaupun sistem pengendalian intern pembayaran klaim sudah diterapkan dan telah terotorisasi oleh pihak yang berwenang, tetapi harus tetap dilakukan pengawasan untuk mengendalikan pelaksanaannya. Pemeriksaan mendadak perlu dilakukan kepala wilayah atau kepala cabang supaya tidak ada yang melanggar SOP yang berlaku. Selanjutnya untuk mencapai pengendalian yang sempurna diperlukan kejujuran, ketelitian, serta kerja sama yang sempurna antar sesama pihak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern Pembayaran Klaim Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang”.

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis memperoleh banyak bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Pembimbing dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak Penasehat Akademik, Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi, Ibu Nelvirita, SE, M.Si.Ak selaku Sekretaris Prodi Diploma III Akuntansi, dan seluruh dosen yang mengajar di Program Studi Diploma III Akuntansi, teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa yang telah berhasil menjadikan penulis seorang sarjana dengan kerja keras yang tiada mengenal lelah, serta sahabat-sahabat terbaik penulis dan semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Demikianlah penulisan makalah ini, semoga bermanfaat bagi pembaca.

Padang, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pengendalian Intern	6
1. Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	6
2. Tanggung Jawab Manajemen Atas Pengendalian Intern....	7
3. Komponen Pengendalian Intern	9
B. Asuransi	17
1. Pengertian asuransi.....	17
2. Jenis-jenis asuransi	20
3. Keuntungan asuransi	22
4. Prinsip-Prinsip asuransi.....	23
5. Jenis-jenis Resiko	25
C. Polis	26
D. Klaim	27
E. Pengendalian Intern Pengeluaran Kas.....	27
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Rancangan Penelitian	29
1. Jenis penelitian	30
2. Tahapan penelitian.....	30
3. Objek penelitian.....	31
4. Teknik pengumpulan data	31
5. Teknik analisis data	33
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Perusahaan	34
1. Profil Perusahaan AJB Bumiputera 1912.....	34
2. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912	36
3. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912.....	37
4. Produk yang dihasilkan AJB Bumiputera 1912	38
B. Prosedur Pembayaran Klaim Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang.....	42

1. Ruang lingkup pembayaran klaim	42
2. Kewenangan pembayaran klaim	42
3. Dasar pembayaran klaim	42
4. Sistem informasi pembayaran klaim	43
C. Sistem Pengendalian Intern Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Bagindo Aziz Chan Padang	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini dilanda berbagai macam krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis moral sampai krisis politik. Krisis ekonomi mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin besar dan kemiskinan yang semakin merajalela. Kejadian tersebut tentu saja berimbas pada krisis moral masyarakat Indonesia yang ditandai dengan banyaknya tindak kriminal yang terjadi, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa tingkat resiko di Indonesia sangatlah tinggi dan menimbulkan kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit.

Berdasarkan permasalahan di atas, banyak pihak yang mulai mempercayakan harta benda maupun jiwanya kepada pihak asuransi sebagai jalan keluar dari kendala yang sering dihadapi, terutama yang menyangkut tentang kerugian yang akan dideritanya. Perusahaan asuransi di Indonesia mendapat tanggapan yang positif dan mulai banyak diminati oleh masyarakat, karena dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan perlindungan bagi setiap pihak tertanggung yang telah menanggungkan harta benda dan jiwanya pada pihak asuransi. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah salah satu dari sekian banyak lembaga asuransi yang berkembang di Indonesia. Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Perusahaan ini didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru yang berasal dari Yogyakarta dan berperan sebagai sekretaris pada Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB). Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi Bumiputera berbeda dengan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang kepemilikannya hanya oleh pemilik modal tertentu saja. Perusahaan ini telah menganut sistem kepemilikan dan pengawasan yang unik, yaitu bentuk badan usaha “*mutual*” atau

“usaha bersama”. Pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas *mutualisme* ini yang kemudian dipadukan dengan *idealisme* dan *profesionalisme*. Hal inilah yang menjadi kekuatan utama Bumiputera sampai sekarang. AJB Bumiputera telah mempunyai banyak anak cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satu cabang dari AJB Bumiputera 1912 berada di Jln. Bagindo Aziz Chan Padang yang menjadi objek penelitian penulis.

Mengingat jumlah nasabah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, AJB Bumiputera 1912 telah mempunyai kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga semua kegiatan perusahaan harus dijalankan sesuai prosedur. Salah satu kegiatan yang sering terjadi adalah pembayaran klaim, yaitu tuntutan ganti rugi oleh tertanggung. Melihat seringnya terjadi transaksi yang berhubungan pembayaran klaim, maka AJB Bumiputera 1912 juga harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang baik terhadap pembayaran klaim untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Maka perusahaan membuat sistem pengendalian internal perusahaan.

Penerapan sistem pengendalian intern pembayaran klaim dalam suatu perusahaan asuransi merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu usaha karena berpengaruh terhadap nasabah/ pemegang polis. Pengendalian intern adalah unit yang sangat berperan dalam kelangsungan perusahaan asuransi salah satunya dalam aktivitas proses pembayaran klaim yaitu untuk menentukan apakah suatu klaim harus dibayar segera, ditunda atau ditolak, yang selanjutnya hal ini akan berefek pada citra perusahaan. Kejadian ini disebabkan karena pembayaran klaim tersebut melalui beberapa jaringan prosedur yang harus diterapkan. Dalam menjalankan jaringan prosedur itu

membutuhkan waktu yang cukup lama. Faktor penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah penyelesaian terhadap klaim-klaim yang diajukan kepada perusahaan asuransi dapat selesai tepat waktu, serta tata cara prosedur yang harus dilakukan oleh pemegang polis/ nasabah sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan, agar dapat menggambarkan sistem pengendalian intern perusahaan yang baik.

Pengendalian intern dalam pembayaran klaim juga berpengaruh dalam kas keuangan perusahaan secara langsung. Pada perusahaan asuransi pengendalian intern sangat diperlukan guna mempermudah dan memberikan arahan dalam proses kegiatan perusahaan dimana dalam hal ini adalah dilakukannya pengajuan klaim dari peserta asuransi ke perusahaan dengan pencairan atau pembayaran dana atas klaim peserta asuransi yang diterima agar berjalan dengan efektif dan efisien. Agar tujuan dari pengendalian intern pada AJB Bumiputera 1912 dapat tercapai, maka diperlukan sistem dan prosedur pembayaran klaim yang telah terorganisir dengan baik, dukungan dari nasabah/pemegang polis seperti, pemegang polis harus paham dengan sistem dan prosedur pembayaran klaim. Tujuannya untuk menghindari rasa tidak percaya nasabah/pemegang polis pada pihak asuransi.

Melihat prosedur dan sistem pengendalian intern pembayaran klaim yang mempunyai tanggung jawab masing-masing fungsi untuk memproses pembayaran klaim dari pemegang polis, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pembayaran klaim pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang. Maka

dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Sistem Pengendalian Intern Pembayaran Klaim Asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya adalah ‘Bagaimana sistem pengendalian internal pembayaran klaim asuransi yang dilakukan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang?’

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan pengamatan yang telah dilaksanakan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang adalah untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian internal pembayaran klaim asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu tentang sistem pengendalian internal pembayaran klaim asuransi.
- b. Bagi perusahaan, dapat menjadi bahan pertimbangan tentang sistem pengendalian intern yang baik terhadap asset perusahaan khususnya pada kas.

- c. Bagi pembaca, dapat mengetahui bagaimana pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan dan bisa dijadikan bahan acuan dalam menilai pengendalian intern terhadap pengeluaran kas disebuah perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian intern entitas tersebut. Menurut Arens (2008: 371), tiga tujuan umum yang merancang sistem pengendalian intern yang efektif:

- a. Reliabilitas pelaporan keuangan. Tujuan pengendalian intern yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
- b. Efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
- c. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Selain mematuhi ketentuan dan hukum dalam Section 404, organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan.

2. Tanggung Jawab Manajemen Atas Pengendalian Intern.

Tanggung jawab atas pengendalian intern berbeda antara manajemen dan auditor.

Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian intern entitas. Manajemen juga diharuskan oleh Section 404 untuk melaporkan secara terbuka tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. Tanggung jawab auditor mencakup memahami dan menguji pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Auditor juga diwajibkan oleh Section 404 untuk menerbitkan laporan audit tentang penilaian manajemen atas pengendalian internalnya, termasuk pendapat auditor mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut.

Manajemen, bukan auditor, yang harus menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian intern entitas. Konsep ini konsisten dengan persyaratan bahwa manajemen, bukan auditor, yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Ada dua konsep utama yang melandasi perancang dan implementasi pengendalian intern, kepastian yang layak dan keterbatasan inheren.

- a. Kepastian yang layak** Perusahaan harus mengembangkan pengendalian intern yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolute, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian intern dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya maupun manfaat pengendalian. Seperti yang didefinisikan oleh PCAOB, kepastian yang layak hanya memberikan kemungkinan yang kecil saja bahwa salah saji yang

material tidak akan tercegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern.

- b. Keterbatasan inheren** Pengendalin intern tidak akan pernah bisa efektif 100%, tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Meskipun personil yang menangani sistem itu sanggup merancang sebuah system yang ideal, keefektifannya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya.

Section 404 dari UU *Sarbanes- Oxley* yang mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan pengendalian intern yang mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian intern yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan.
- 2) Suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan.

Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian intern. Penilaian manajemen mengenai pengendalian intern atas pelaporan keuangan terdiri dari dua komponen utama. Pertama, manajemen harus mengevaluasi rancangan pengendalian intern atas laporan keuangan. Kedua, manajemen harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian tersebut.

Rancangan pengendalian intern, manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian atas asersi yang relevan bagi semua akun dan pengungkapan yang signifikan dalam laporan keuangan. Hal ini termasuk mengevaluasi bagaimana transaksi yang signifikan dimulai, diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan untuk mengidentifikasi titik-titik arus transaksi dimana salah saji yang material akibat kekeliruan atau kecurangan bisa terjadi. **Efektivitas pelaksanaan pengendalian**, manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang, dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif.

3. Komponen Pengendalian Intern

Menurut Arens (2008: 376) ada lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Setiap komponen mengandung banyak pengendalian, tetapi auditor hanya akan berfokus pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Komponen pengendalian internal *COSO* meliputi hal-hal ini:

a) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian (*control environment*) terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting.

- 1) Integritas dan Nilai-nilai etis, adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik.
- 2) Komitmen pada kompetensi, kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang. Komitmen pada kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
- 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit, dewan komisaris berperan penting dalam tata kelola korporasi yang efektif karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian intern dan

proses pelaporan keuangan yang layak. Untuk membantunya melakukan pengawasan, dewan membentuk komite audit yang disertai tanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, termasuk menyetujui jasa audit dan nonaudit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan publik. Hal ini memungkinkan para auditor dan direktur membahas berbagai masalah yang mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti integritas atau tindakan manajemen. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis entitas dan akuntabilitas entitas, termasuk pelaporan keuangan dan pengungkapan, disebut sebagai **pihak-pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola** oleh standar auditing.

Filosofi dan gaya operasi manajemen manajemen, melalui aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian intern. Memahami aspek ini serta aspek-aspek serupa dalam filosofi dan gaya operasi manajemen akan membuat auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.

Struktur organisasi entitas menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari pengelolaan dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian diimplementasikan.

Kebijakan dan praktik sumber daya manusia, aspek paling penting dari pengendalian intern adalah personil. Jika para karyawan kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lainnya dapat diabaikan, dan laporan keuangan yang andal masih akan dihasilkan. Orang-orang yang tidak kompeten atau tidak jujur bisa merusak sistem, meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan.

b) Penilaian risiko

Penilaian risiko (*risk assessment*) atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Setelah mengidentifikasi suatu risiko, manajemen mengestimasi signifikan risiko itu, menilai kemungkinan terjadinya risiko itu, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko itu ke tingkat yang dapat diterima. Jika manajemen secara efektif menilai dan merespon risiko itu, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti

ketimbang jika manajemen gagal mengidentifikasi atau merespon risiko yang signifikan.

Auditor akan memperoleh pengetahuan tentang proses penilaian risiko oleh manajemen dengan memanfaatkan kuesioner dan diskusi dengan manajemen untuk menentukan bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikan dan kemungkinan terjadinya risiko itu, serta memutuskan tindakan apa yang diperlukan untuk menangani risiko itu.

c) Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi lima jenis berikut ini:

1) Pemisahan tugas yang memadai

Ada empat pedoman umum menyangkut pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah baik kecurangan maupun kekeliruan yang terutama penting bagi auditor.

- a. Pemisahan penyimpanan aktiva dari akuntansi
- b. Pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aktiva terkait
- c. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan
- d. Pemisahan tugas TI dari Departemen Pemakai

2) Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas

Otorisasi dapat bersifat umum atau khusus. Dengan **otorisasi umum**, manajemen menetapkan kebijakan, dan para bawahan diinstruksikan untuk mengimplementasikan otorisasi umum tersebut dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang ditetapkan oleh kebijakan itu. **Otorisasi khusus** (*specific authorization*) berlaku untuk transaksi individual. Untuk transaksi tertentu, manajemen memilih mengotorisasi setiap transaksi. Perbedaan antara otorisasi dan persetujuan juga merupakan hal yang penting. Otorisasi adalah keputusan kebijakan, entah untuk kelas transaksi umum ataupun transaksi khusus. Persetujuan adalah implementasi dari keputusan otorisasi umum manajemen.

3) Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Dokumen dan catatan meliputi berbagai item seperti faktur penjualan, pesanan pembelian, catatan pembantu, jurnal penjualan, dan kartu absensi karyawan. Prinsip-prinsip tertentu akan mengatur perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang baik. Dokumen dan catatan harus:

- a. Dipranomori secara berurutan untuk memudahkan atas dokumen yang hilang dan sebagai alat bantu untuk mencari dokumen itu ketika diperlukan di kemudian hari. Dokumen yang dipranomori penting bagi tujuan kelengkapan audit yang terkait dengan transaksi.

- b. Disiapkan pada waktu transaksi berlangsung, atau sesegera mungkin, untuk meminimalkan kesalahan penetapan waktu.
- c. Dirancang untuk berbagai penggunaan, jika mungkin, guna meminimalkan jumlah formulir yang berbeda.
- d. Dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penyiapan yang benar.

Suatu pengendalian yang berhubungan erat dengan dokumen dan catatan adalah **bagan akun** (*chart of accounts*), yang mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun neraca dan laporan laba-rugi. Bagan akun ini berguna untuk mencegah kesalahan klasifikasi jika dengan akurat menguraikan jenis transaksi mana yang harus dimasukkan dalam setiap akun.

4) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Untuk menyelenggarakan pengendalian intern yang memadai, aktiva dan catatan harus dilindungi. Jika dibiarkan tidak terlindungi, aktiva itu bisa dicuri. Jika tidak terlindungi secara memadai, catatan bisa dicuri, rusak, atau hilang, yang dapat sangat mengganggu proses akuntansi dan operasi bisnis. Jenis ukuran protektif yang paling penting untuk menjaga aktiva dan catatan adalah penggunaan tindakan pencegahan fisik.

5) Pemeriksaan kinerja secara independen

Kategori terakhir dari aktivitas pengendalian adalah review yang cermat dan berkelanjutan atas keempat hal lainnya, yang sering disebut **pemeriksaan independen** (*independent checks*) atau verifikasi internal. Kebutuhan akan pemeriksaan independen timbul

karena pengendalian internal cenderung berubah seiring dengan berlalunya waktu, kecuali review sering dilakukan.

d) Informasi dan komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memroses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait.

e) Pemantauan

Aktivitas pemantauan/ pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan jika terjadi perubahan kondisi. Agar menjadi efektif, fungsi pengendalian internal harus dijalankan oleh staf yang independen dari departemen operasi maupun dari departemen akuntansi dan melaporkan langsung kepada otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi.

B. ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan

“*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Asuransi merupakan sarana untuk menghadapi berbagai resiko seperti kecelakaan, kehilangan, kematian, kerugian, dan sebagainya atas harta benda yang dimiliki. Asuransi adalah suatu perjanjian antara 2 pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan beberapa hal berikut :

- a) Badan usaha asuransi sebagai penanggung berhak menerima premi dan berkewajiban memberikan ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi.
- b) Pihak tertanggung berkewajiban membayar premi dan berhak menerima ganti rugi atas peristiwa yang merugikan terjadi.
- c) Usaha asuransi merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat berupa premi dan menginvestasikan dana tersebut pada berbagai perusahaan atau lembaga keuangan untuk memperoleh pendapatan.
- d) Usaha asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut Undang-undang No 1 Tahun 1992

Tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksir dulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

2. Jenis-jenis Asuransi

Menurut Kasmir (2007: 278) jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi fungsinya

1) Asuransi kerugian (*non life insurance*)

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha luar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah:

- a) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan terbang dan lainnya.
- b) Asuransi pengangkutan meliputi *marine hull policy, marine cargo policy, dan freight*.
- c) Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian dan lainnya.

2) Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

- a) Asuransi berjangka (*Term insurance*)
- b) Asuransi tabungan (*Endowment insurance*)
- c) Asuransi seumur hidup (*Whole life insurance*)
- d) *Annuity kontrak insurance* (Anuitas)

3) Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungjawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

- a) Bentuk *treaty*
- b) Bentuk *facultative*
- c) Kombinasi dari keduanya

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.

1) Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.

a) Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b) Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari Negara lain dan jelas kepemilikannya pun oleh 100% oleh pihak asing.

c) Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

3. Keuntungan Asuransi

Menurut Kasmir (2007: 280) perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharapkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Demikian pula dengan nasabah yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang digunakannya.

Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan asuransi
 - 1) Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah.
 - 2) Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain
 - 3) Keuntungan dari hasil bunga dari investasi surat-surat berharga.
- b. Bagi nasabah
 - 1) Memberikan rasa aman.
 - 2) Merupakan simpanan yang padat saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.
 - 3) Terhindari dari resiko kerugian atau kehilangan.
 - 4) Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang.
 - 5) Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.

4. Prinsip-prinsip Asuransi

Menurut Kasmir (2007: 281) pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari antara pihak perusahaan dengan pihak nasabahnya.

Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah:

- a. *Insurable Interest* merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara

tertanggung dan suatu yang dipertanggung dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggung.

- b. *Utmost Good Faith* atau "itikad baik" dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah di dasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun immaterial.
- c. *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
- d. *Proximate Cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
- e. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.

- f. *Contribution* suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

5. Jenis-jenis Resiko

Dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi, besar kecilnya suatu resiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar.

Menurut Kasmir (2007: 283) dalam praktiknya resiko-resiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Resiko murni, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, contoh rumah mungkin akan terbakar, atau mobil yang dikendarai mungkin akan tertabrak atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali

- b. Resiko spekulatif, artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.
- c. Resiko individu, resiko individu dibagi 3 macam, yaitu:
 - 1) Resiko pribadi, resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau mati.
 - 2) Resiko harta, resiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.
 - 3) Resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang pihak lain.

C. POLIS

Bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 255 KHUD pembuatan persetujuan mewajibkan penanggung untuk menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung pada jangka waktu tertentu. Walaupun yang menandatangani hanya penanggung tetapi juga mengikat tertanggung.

Fungsi polis:

1. Perjanjian pertanggungan
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami tertanggung.
3. Sebagai pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Macam-macam polis:

1. Polis perjalanan, yaitu menjamin barang *insurable interest* sampai perjalanan sampai di tempat.
2. Polis pelabuhan, yaitu menanggung risiko yang mungkin menimpa kapal selama di pelabuhan.
3. Polis waktu, yaitu pertanggungan yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4. Polis veem, yaitu menanggung barang selama berada di gudang dari kemungkinan risiko rusak, terbakar, atau hilang.

D. KLAIM

Berdasarkan peraturan direksi AJB Bumiputera 1912 No. PE. 12/DIR/TEK/2007 menjelaskan klaim adalah suatu tuntutan atas hak dari pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai, yang timbul karena syarat-syarat karena perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Pada asuransi jiwa, jenis-jenis klaim dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Klaim Meninggal
2. Klaim Penebusan
3. Klaim Habis Kontrak
4. Klaim Dana Beasiswa/ Dana Kelangsungan Belajar (DKB)
5. Klaim UP Bebas Premi
6. Klaim Rawat Inap.

E. PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN KAS

Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan itu adalah untuk membayar bermacam-macam transaksi. Apabila pengawasan tidak dijalankan dengan ketat, sering kali jumlah pengeluaran diperbesar dan selisihnya digelapkan. Beberapa prosedur pengawasan yang penting sebagai berikut:

- a. Semua Pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil.
- b. Dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat.
- c. Penulisan cek hanya apabila didukung bukti-bukti (dokumen) yang lengkap atau digunakan system voucher.
- d. Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek dan yang mencatat pengeluaran kas.
- e. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tentu.
- f. Diharuskan membuat laporan kas harian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta berdasarkan observasi terhadap sistem pengendalian intern pembayaran klaim pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi yang bergerak dibidang asuransi jiwa yang terdiri dari berbagai macam produk,
2. Pengendalian intern pembayaran klaim pada AJB Bumiputera 1912 terdiri dari serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjamin terciptanya tujuan perusahaan. Rangkaian kebijakan dan prosedur yang diterapkan sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi tercapainya tujuan perusahaan.
3. Kebijakan yang diterapkan oleh AJB Bumiputera 1912 dalam pengendalian intern pembayaran klaim perusahaan telah dilakukan dengan semestinya, seperti adanya dokumen-dokumen pembayaran klaim, yaitu blanko pengajuan klaim, KTP, polis asli, kwitansi pembayaran premi akhir, surat rekomendasi, dokumen keputusan klaim, laporan persetujuan klaim, kwitansi pembayaran klaim, dan bukti penarikan bank. Selain itu dilakukan juga pemisahan tugas antara fungsi klaim, fungsi otorisasi, fungsi teknis, dan fungsi keuangan. Hal ini sangat membantu dalam pengawasan terhadap pengendalian intern pembayaran klaim asuransi untuk menciptakan lingkungan pengendalian sehat, sehingga dapat membantu tujuan perusahaan dengan segala keterbatasan pengendalian intern yang akan selalu ada.

B. Saran

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pembayaran klaim pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang sudah cukup baik dengan adanya pemisahan fungsi pokok pada masing-masing bagian dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas sehingga memudahkan untuk melakukan pekerjaan masing-masing.

Walaupun sistem otorisasi dan pencatatan dalam penerimaan sudah terotorisasi oleh pihak yang berwenang, tetapi harus tetap dilakukan pengawasan untuk mengendalikan pelaksanaannya. Pemeriksaan mendadak perlu dilakukan dewan direksi atau kepala cabang supaya tidak ada yang melanggar SOP yang berlaku. Selanjutnya untuk mencapai pengendalian yang sempurna diperlukan kejujuran, ketelitian, serta kerja sama yang sempurna antar sesama pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen- dokumen AJB Bumiputera 1912 Kanwil Padang

Arens, Alvin A. 2008. Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Erlangga

Arens, Alvin A dan Elder, Randal J. 2012. Jasa Audit dan Assurance. Jakarta: Salemba Empat

Pandia, Frianto. 2009. Lembaga Keuangan. Jakarta: PT RINEKE CIPTA

Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soemarso S. R. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat

<http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi> diunduh pada tanggal 07 Januari 2014 jam 14.35



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089
Fas. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

Nomor : 3802/UN35.1.7/FP/2014 19 Mei 2014
Lamp. :-
Hal : *Observasi*

Kepada : Yth. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
Jl. Bagindo Aziz Chan
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penulisan Tugas Akhir, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Dewi Wahyuni Eka Putri**
BP/NIM : 2010/57988
Program Studi : D3 Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan

bermaksud akan melakukan Observasi pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, mengenai : *SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PADA AIB BUMI PUTERA KANTOR WILAYAH PADANG.*

Sehubungan dengan itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan Observasi dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.



Dekan
Bantu Dekan I,
Dr. Hris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005